

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Dahulu ketika duduk di sekolah dasar pada saat pelajaran sejarah seorang guru pernah bercerita tentang sulitnya seorang anak bangsa mencari ilmu disaat bangsa ini masih di bawah pendudukan sebuah perusahaan dagang dari belanda *Vereenigde Oostindische Compagnie* (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC pada zaman penjajahan *doeloe* yang konon katanya sampai 300 tahun.

Pendidikan masuk ke Indonesia sejak dilakukannya politik etis oleh bangsa Belanda karena suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran *De Locomotief*) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Sehingga Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program *Trias Politika* yang meliputi: *Pertama*, Irigasi (pengairan), membangun dan

memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kedua, Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Ketiga, Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.<sup>1</sup> Sebenarnya pendidikan pada saat itu dilatarbelakangi mendidik kaum pribumi agar pemerintahan Belanda pada saat itu bisa mendapatkan tenaga kerja trampil dan murah dari kalangan pribumi.

Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Namun di zaman itu anak bangsa yang mengenyam pendidikan sungguh sangat jarang sekali dan harganya pun terbilang mahal. Sehingga kesempatan itupun hanya diperoleh oleh anak berdarah biru yaitu anak dari seorang bangsawan yang mempunyai uang. Harapan itu adalah pendidikan yang kelak diharapkan menjadi alat perjuangan rakyat meninggalkan keterbelakangan dan kebodohan di negeri berjuluk Nusantara ini.

Kini kembali bangsa kita memperjuangkan pemerataan pendidikan tidak terasa telah 66 tahun lalu Indonesia merdeka secara prosedural ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan Proklamasi atas nama segenap bangsa Indonesia, Akan tetapi antiklimaks di hampir semua sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan semua rakyat Indonesia masih tetap tertatih dan tertinggal dibalik kemajuan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Khususnya pada sektor pendidikan makna kemerdekaan patut direnungkan

---

<sup>1</sup> Wikipedia bahasa Indonesia. Politik etis

kembali ketika sekian banyak rakyat bangsa ini tak mampu lagi mengakses pendidikan. Tak begitu sulit jika ingin membuktikan kebenarannya, cukup anda berada di perempatan jalan, anda akan langsung melihat potret kelam bangsa ini dengan melodi khas kincringan yang terbuat dari tutup botol minuman. Statistik mencatat anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah di negeri ini tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah Pencapaian rata-rata angka partisipasi kasar di jenjang SMP/MTs secara nasional 2009/2010 mencapai 98,11 persen atau di atas target 95 persen. Artinya, masih ada sekitar 1,89 persen penduduk usia SMP yang tidak sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah siswa SMP sederajat sekitar 12 juta siswa<sup>2</sup>. Kondisi ini diperparah oleh angka buta aksara penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2009 masih sekitar 5,3 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 8,7 juta jiwa,” kata Dirjen Pendidikan Non-Formal dan Informal Kemendiknas RI Hamid Muhammad<sup>3</sup>. Jumlah pengangguran di negeri ini juga sangat menyedihkan yaitu jumlah pengangguran pada Agustus 2010 mencapai 8,3 juta orang atau 7,14% dari total angkatan kerja<sup>4</sup> ini disebabkan lebih banyaknya angkatan kerja yang lulus tiap tahunnya dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan. Mirisnya inflasi tahunan negeri ini yang menyentuh 6,96

---

<sup>2</sup> <http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/09/02435364/Angka.Putus.Sekolah.Masih.Tinggi>.

<sup>3</sup> <http://mataguru.com/pendidikan/jumlah-buta-aksara-di-indonesia-masih-87-juta-jiwa.html>

<sup>4</sup> <http://www.detikfinance.com/read/2010/12/01/131825/1506690/4/bps-sarjana-di-indonesia-paling-banyak-jadi-pengangguran>

% Januari-Desember tahun 2010<sup>5</sup> yang membuat meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup setiap tahunnya termasuk trend harga-harga pendidikan yang juga meningkat tiap tahunnya apalagi isu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sebesar 28,7 % hingga BPS (Badan Pusat Statistik) memprediksi pada pertengahan juni inflasi akan diatas 10 % tentu imbas *multiplier effect* dari kebijakan ini akan sangat dirasakan sekali oleh bangsa Indonesia di semua sektor.

Tak asing lagi saya mendengar semboyan “orang kaya semakin kaya, orang miskin tetap saja miskin”. Jika melihat statistik kemiskinan pada tahun 2010 penduduk miskin di negeri ini tercatat sebanyak 31,02 Juta jiwa atau jika di prosentasekan 13,33%<sup>6</sup> hasil itupun merupakan versi pemerintah, tentu pada tataran fakta penduduk miskin di negeri lebih banyak karena pada perhitungan tersebut standar penduduk miskin menurut BPS berdasarkan perhitungan maret 2010 hanyalah Rp 211.000,-/bulan.<sup>7</sup> Lebih jauh mengupas standar kemiskinan menurut BPS penduduk Indonesia pendapat perharinya hanya sebesar Rp 7.000,-/hari<sup>8</sup>. Padahal standar penduduk miskin menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah penduduk yang pendapatannya dibawah USD 1,25 dollar/hari sedangkan menurut World Bank standar

---

<sup>5</sup>[http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/46881/2011/01/03/bps\\_inflasi\\_2010\\_capai\\_696\\_persen/](http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/46881/2011/01/03/bps_inflasi_2010_capai_696_persen/)

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2010*, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010

<sup>7</sup> <http://www.inilah.com/read/detail/835071/bps-standar-kemiskinan-berpenghasilan-rp211-rb-per-bulan/>

<sup>8</sup> Standard BPS (Rp 211.000,-) dibagi 30 hari

kemiskinan dibawah USD 2 dolar/hari. Sejujurnya pendapat sejumlah itu sangat tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar di zaman sekarang ini. Ada benarnya mungkin pada zaman ini harga pendidikan sungguh ada di awang-awang. Jika dipikirkan bagaimana penduduk miskin negeri ini bisa mengakses pendidikan dan merubah nasibnya, Jika membandingkan pendapatan penduduk miskin dengan harga pendidikan di negeri ini tentu penduduk miskin hanya bisa memimpikan pendidikan. Pendapatan sebesar itu untuk mempertahankan hidup perhari saja sudah kelelahan apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Alhasil yang mampu mengakses pendidikan mahal hanyalah orang yang mampu membayar pendidikan. Fakta ini sungguh sangat miris padahal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas) pada tahun 2003 biaya pendidikan selama ini lebih banyak ditanggung oleh masyarakat daripada pemerintah. Porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa mencapai 53,74 persen sampai 73,87 persen dari biaya pendidikan total (BPT). Sementara porsi biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat (selain orangtua siswa) sebesar 26,13 persen sampai 46,26 persen dari BPT<sup>9</sup> dan di prediksi angkah itu tidak jauh berubah mengingat anggaran 20% pendidikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berjalan kurang maksimal. Hal ini semakin membenarkan pernyataan "jika anda mampu membayar pendidikan, barulah

<sup>9</sup> <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=783>

anda berhak mendapatkan pendidikan, begitulah cara bangsa ini memperlakukan kita”.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan Negara ini secara eksplisit pada Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Akan tetapi implementasi pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 hanya menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 persen APBN pada 2005, 10,3 persen APBN 2006, 10,6 persen APBN 2007, dan 10,9 persen APBN 2008<sup>10</sup>. Untuk implementasi 20% anggaran untuk pendidikan saja masih belum disiplin padahal sebenarnya bangsa ini telah tertinggal oleh Negara-negara di ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nation*). Kita bisa bandingkan dengan Negara tetangga kita yaitu Malaysia yang pada 2011 ini anggaran pendidikannya mendekati 30% dari APBN, anggaran pendidikan Singapura juga sejak 2008 telah mengalokasikan 25% anggaran pemerintahannya untuk pendidikan, sedangkan Thailand 30% dari APBN.

<sup>10</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/08/31/brk,20070831-106649,id.html>

Lebih lanjut kita bisa melihat ketidakseriusan Negara ini dalam pendidikan adalah seberapa besar Negara mengeluarkan dana R & D (*Research and Development*) demi kemajuan sebuah bangsa dari penelitian-penelitian untuk menemukan penemuan-penemuan terbaru. Kaum profesional intelektual dengan gagasan-gagasannya serta ketrampilan yang dimilikinya merupakan bagian penting dalam suatu masyarakat. Gagasan-gagasan mereka sangat diperlukan dalam menggerakkan perubahan dan perbaikan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari polarisasi ekonomi yang selanjutnya menyebabkan polarisasi sosial yakni kaum miskin akan selamanya miskin karena mereka kaum miskin tidak akan mampu berpendidikan karena kemampuan daya belinya terhadap pendidikan. Padahal secara konstitusi yang tertuang pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara yang berdomisili di Negara ini berhak mengeyam pendidikan.

Pendidikan berdasarkan dengan mekanisme pasar itu membuat pendidikan memiliki harga yang melangit dan tidak dapat dijangkau oleh rakyat yang ekonominya terpuruk. Trend Korporatokrasi di Indonesia memang sedang meningkat hal ini diamini Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo era Susilo Bambang Yhudoyono-Kala di depan Mahkamah Konstitusi, “dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari perubahan-perubahan global seperti perdagangan bebas. Menghadapi perubahan-perubahan itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum agar investasi modal

asing dapat masuk".<sup>11</sup> Sudah menjadi alasan umum kenapa bangsa ini harus membuka investasi langsung selebar-lebarnya yaitu ketiadaan "Uang". Sistem Pertumbuhan Cepat (*Rapid Growth System*) yang menjadi andalan pembangunan bangsa Pemerintahan SBY-Boediono ini membutuhkan sangat banyak uang untuk melakukan akselerasi pertumbuhan yaitu dengan membuka selebar-lebarnya investasi langsung dari luar ataupun dalam negeri yang didukung oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Akselerasi itu juga termasuk pada sektor pendidikan tercatat amanat 20 % APBN yang tidak mampu di penuhi oleh Negara untuk itu jalannya adalah membuka sektor swasta untuk ikut berperan serta di dunia pendidikan kita. Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah masuknya modal asing dalam pengelolaan pendidikan Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan universitas. Dengan demikian nantinya akan ada sekolah-sekolah yang dimiliki oleh asing, dan dikelola sesuai dengan tujuan diinvestasikannya modal tersebut. Tentu karena tujuan investasi modal tersebut adalah untuk mendapatkan laba, maka institusi pendidikan menjadi sebuah institusi bisnis yang proses pengelolaannya akan berorientasi kepada laba. Dari fakta tersebut kita bisa melihat secara gamblang dinamika Negara mencoba meminimalisir fungsi pelayanan masyarakat (*public service*) dan melebarkan kesempatan untuk swasta.

<sup>11</sup> Arifin Anwar, "Bukan (BHP) huruf besar, Tetapi (bhp) huruf kecil," dalam *Educare*, No. 11/III/februari 2007, hlm. 17.

Jika pendidikan di kuasai oleh Swasta dan lembaga kepentingan kelompok sepantasnya penulis merasa khawatir. Penulis merenungi sebenarnya apa yang paling esensial dari sebuah Negara? Jawabnya adalah kepribadian sebuah Negara. Kepribadian sebuah Negara dibangun oleh pendidikan, oleh proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Tentu pengaruh signifikan ideologi berperan besar membentuk kepribadian sebuah Negara. sebenarnya berapa signifikan pengaruh ideologi dalam hidup kita? Padahal ideologi adalah merupakan ide/pandangan tertentu yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dalam keadaan sadar maupun tak sadar. Apalagi Habermas dengan tegas menolak sikap yang dikatakan sebagai bebas nilai dalam pembentukan ilmu pengetahuan.

Di era globalisasi yang telah menghancurkan sekat-sekat pelindung kebangsaan menjadi dunia terbuka atau dunia tanpa batas (*Borderless World*). Pada akhirnya, ini akan menghancurkan pluralisme, dan menciptakan homogenisasi sehingga banyak kalangan menilai bahwa penguasaan Negara-negara maju terhadap Negara-negara dunia ketiga tidak lagi sebatas ekonomi dan politik, tetapi juga melibatkan pikiran (*the mind*). Tentu kondisi yang seperti ini akan membuat lebih bebasnya transformasi nilai-nilai ideologi kehidupan dan oleh sebab itu juga terjadi perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, juga mengalami perubahan yang besar oleh tsunami globalisasi ini dimana mulai lunturnya kekuatan Negara. Tidak hanya secara administrative pendidikan akan tetapi pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam merubah

pikiran (*mind*) kebangsaan kita melalui pendidikan yang katanya adalah *way of life* sosial kebudayaan sebuah bangsa. Karena signifikansinya sebagai *way of life* sebuah bangsa itulah maka pendidikan tidak boleh di kontrol oleh Swasta ataupun lembaga kepentingan kelompok dan sebagaimana mestinya Negara lah yang harus menguasai penuh pendidikan nasional kita. Jangan sampai terpolah pikiran bahwa apa-apa saja yang berbau *western* (barat) itu lebih baik atau lebih unggul daripada kebudayaan bangsa ini sendiri dan menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kebangsaan kita.

Jika melihat fenomena itu sepantasnya kita merasa khawatir terhadap apa yang disebut neo-imperialisme atau penjajahan jenis baru yang menyandera bangsa-bangsa di dunia dan khususnya bangsa kita Indonesia. Melihat pengaruh signifikannya peran Negara yang seharusnya berfungsi untuk mensejahterahkan, melindungi bangsa dari intervensi kekuatan asing, dan menjamin hak-hak rakyatnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal yang layak dengan kebijakan-kebijakannya yang tertuang di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahannya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer, Akan tetapi karena wewenangnya yang besar tersebutlah Negara menjadi sangat signifikan pentingnya dan jangan sampai dikuasai oleh kepentingan segilintir orang apalagi kepentingan ekonomi suatu kelompok karena Negara sejatinya untuk melaksanakan kepentingan umum.

Namun melihat fenomena sekarang neoliberalisme justru menggunakan peran penting negara sebagai alat untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan kaum pemodal mengakumulasi kekayaan melalui lembaga-lembaga *Think Thank* seperti IMF, World Bank, dan WTO. Tak khayal penindasan dan penghisapan semakin menemukan bentuk kesempurnaannya dan dapat berlangsung lama, karena alat yang digunakan untuk mempertahankan kebijakan yang menguntungkan para pemodal adalah negara dan lembaga-lembaga Internasional. Tragisnya jika ada yang melanggar kebijakan itu tentu akan dihadapi oleh negara dengan kekerasan dengan menggunakan militer, undang-undang, dan pengadilan inilah yang disebut *Represif State Aparatus* menurut Louis Althusser. Dalam artian ini Negara telah sepenuhnya menjadi alat dari berlangsungnya sistem kapitalis. Sejak pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto Negara ini telah masuk dalam pengaruh kaum pemilik modal atau neoliberalisme sampai pemerintahan Susilo Bambang Yhudoyono (SBY)-Budiono. Di era SBY-Boediono malah aroma neoliberalisme semakin kental dan sempurna.

Kekhawatiran Penulis adalah ketika membuminya pengaruh signifikan neoliberalisme tidak hanya akan menggerus dunia pendidikan kita secara administrative akan tetapi juga akan menghegemoni pandangan hidup (*Common Sense*) kebangsaan kita yang akan berpengaruh pada kepribadian bangsa. Mungkin ini saatnya kita harus mengkaji ulang apa ideology kebangsaan kita.

## PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, mendeskripsikan betapa mirisnya kehidupan ekonomi yang rendah, pendidikan yang mahal dikarenakan system pendidikan yang bersifat *profit oriented*, dan signifikansi ideology yang sejati akan langsung mempengaruhi *way of life* sebuah bangsa seperti Indonesia. Maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

**Bagaimana pengaruh Neoliberalisme terhadap kebijakan pendidikan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono 2004-2011?**

## C. BATASAN MASALAH

### 1. Kebijakan Pendidikan Yang Dipengaruhi Neoliberalisme

Pengaruh neoliberalisasi dalam penelitian ini adalah paham neoliberal menggunakan peran negara sebagai perisai pelindung atau perpanjangan tangan dari kepetingan kaum modal untuk membuat kebijakan undang-undang. Sehingga peran negara menjadi minimal. Adapun kebijakannya adalah:

#### 1) Produk Hukum

Negara yang dipengaruhi oleh paham neoliberalisme berusaha membuat hukum yang menguntungkan bagi kaum modal sehingga mejadi legal dan terlihat wajar.

#### 2) Kebijakan Pendidikan

Adapun pengaruh dari produk hukum akan langsung berdampak pada kebijakan pendidikan di tataran operasional pendidikan. Berikut kebijakan turunan yang menurut penulis dipengaruhi oleh paham neoliberal:

- 1) Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- 2) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
- 3) World Class University
- 4) PP No. 77 Tahun 2007 Mengenai Penanaman Modal Asing
- 5) Vokasionalisasi atau Profesionalisasi Pendidikan Tinggi
- 6) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- 7) Badan Hukum Pendidikan (BHP)

## 2. Pengaruh Kebijakan Komersialisasi Pendidikan

Akhirnya dampak sistemik dari pengaruh neoliberal di sektor pendidikan Indonesia ini akan mempengaruhi:

- a. Mahalnya Pendidikan di Indonesia
- b. Pandangan Masyarakat Terpengaruh Moral Ekonomi
- c. Mahalnya Pendidikan Menyebabkan Kemiskinan

## D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kebenaran bahwa ideologi Neoliberalisme memiliki pengaruh yang sangat besar dalam demokrasi pendidikan di Indonesia. Menurut prakonsepsi filosofis penulis ideology ini sangat kental di Indonesia sebagai representasinya adalah praktek komersialisasi pendidikan yang telah di fasilitasi oleh pemerintah yaitu

Undang-undang yang memberi hak legal yang menjadikan lebih *untouchable*. Akan tetapi dibalik itu pengaruh secara ideologis lah yang sangat penting untuk di khawatirkan karena akan sangat berpengaruh pada *mind* kebangsaan kita.

- b. Membenarkan bahwa ada pengaruh negatif dari ideologi Neoliberalisme yang sedang mengancam kedaulatan Negara di semua aspek kehidupan. Secara lebih teliti ideology ini akan membentuk *mind* kebangsaan setiap individu bangsa ini yaitu mempengaruhi setiap individu tentang “kebenaran”.
- c. Sebagai langkah untuk mencoba mengdekonstruksi pemahaman yang salah tentang kebijakan mapan yang telah jalankan pemerintahan demi pemerintahan di Indonesia yaitu penganut akut Ideologi Neoliberalisme dengan produk undang-undang pemerintah yang malah menjadi perisai pelindung kepentingan asing di negeri yang sejatinya masih terjajah ini.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pencinta ilmu, khususnya pemerhati ideologi neoliberalisme, pendidikan, dan kebudayaan serta diharapkan dapat menjadi bahan dan kajian bagi para pencari kebenaran

## b. Manfaat Praktis

Sesuai dengan fungsi pendidikan yang mencerahkan penulis berharap dari penelitian ini dapat membuka mata masyarakat akan bahayanya paham neoliberalisme yang sedang menerpa bangsa ini. Kemiskinan, pengangguran, sekolah mahal, kesehatan mahal, dan kesengsaraan setiap warga memenuhi kebutuhan dasarnya adalah dikarenakan Negara ini telah penganut akut ideologi Neoliberal. Jika kita ingin memenuhi semua kebutuhan dasar itu maka kita harus membayar begitulah Negara ini memperlakukan kita. Semangat komersialisasi yang dilegalisasi oleh rezim berkuasa. Semoga kedepan anak ku bisa sekolah. Amin.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini ada beberapa referenssi yang membantu penulis untuk mengupas lebih jauh tentang neoliberal di sektor pendidikan. *Pertama*, *Kekuasaan dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* oleh Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. Dalam buku ini jelas kapasitas seorang Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. sangat *expert* dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam buku ini ia menulis secara eksplisit. Pada bagian pertama yaitu manajemen pendidikan nasional sampai program-program yang menurutnya merupakan korporatokrasi pendidikan dan menjelaskan satu persatu tentang korporatokrasi pendidikan dewasa ini namun ia membahas seperluhnya saja dan tidak secara detail. Lalu ia membahas pendidikan sebagai proses

kebudayaan dengan menyusupkan pendidikan dan kebudayaan beserta hakikatnya. Pada bagian kedua, ia membahas pendidikan dan kekuasaan dengan perspektif studi cultural. Pada bagian ketiga, ia membahas masalah manajemen pendidikan nasional. *Kedua, Liberalisasi Pendidikan (Mengadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa)* oleh Mu'arif. Seorang penulis muda Muhammadiyah ini membahas pendidikan secara problematic dan menguraikan secara apik kelebihan dan kekurangan pendidikan nasional. Ia juga memasukan peta Ideologi pendidikan sebagai dasar analitis ke tulisan-tulisan selanjutnya. Selanjutnya ia membahas problem visi pendidikan, kebijakan sarat beban serta problema-problema lainnya. *Ketiga, Orang Miskin Dilarang Sekolah* oleh Eko Prasetyo. Jelas sekali seorang penulis buku ini berangkat dari realitas yang ada tentang pendidikan. Menurutnya yang berhak dan penikmat sejati pendidikan adalah mereka yang bisa membayar pendidikan alias orang-orang berduit saja. Sekolah hanyalah milik yayasan yang mempunyai modal yang mengincar profit karena dalam bisnis pendidikan setiap tahunnya menampung pasien yang siap berobat jalan sampai jenjang tertinggi. Dan pada akhirnya buku ini membahas permasalahan pengangguran padahal tentu zaman sekarang manusia berijazah semakin banyak jumlahnya dan ia menuntut bahwa sekolah itu musti murah. *Keempat, Menggugat Pendidikan* oleh Kumpulan Tulisan Tentang Pendidikan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan orang-orang terkemuka dunia seperti Erich Fromm, Ivan Illich, Paolo Freire sampai John Dewey. Mereka menulis

tentang pendidikan yang masing-masing mempunyai perspektif berbeda mengenai pendidikan. Ada yang bersudut pandang fundamentalis, konservatif, liberal, dan anarkis. Pada tulisan Freire jelas terlihat dia mengkritik pendidikan yang tidak manusiawi yaitu pendidikan gaya bank yang tidak memungkinkan ada pendidikan dialogis di dalamnya. Ivan Illich berbeda, ia malah memandang sekolah itu harusnya ditiadakan saja karena membuat seorang individu tertekan dan tidak bebas apalagi menurutnya pendidikan itu membentuk manusia untuk masa depan yang dimana setiap murid yang akan berijasah harus melewati pendidikan berjenjang sesuai dengan harganya. *Kelima, Membenahi Pendidikan Nasional* oleh Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. Dalam karya tulisnya ini Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. membahas permasalahan pendidikan Indonesia ketika globalisasi menerpa Indonesia dan otonomi yang merupakan suatu konsekuensi logis pasca reformasi. Disinilah tulisan cerdasnya ingin mencoba memperbaiki pendidikan nasional. *Keenam, Reformasi Pendidikan (Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah)* oleh Dr. H.M. Zainuddin M.Pd. Pada buku ini terlihat sekali penulis menguasai problema-problema ke-Indonesian namun kali ini Dr. H.M. Zainuddin M.Pd lebih menitik beratkan pada Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah. Di buku ini penulis melihat bahwa pendidikan merupakan salah satu gerak menuju perubahan sosial. Penulis disini menyadari bahwa pendidikan di negeri ini telah menjadi barang publik namun penulis membahas biaya pendidikan, kurikulum dan kebijakan

perubahannya. *Ketujuh*, Ideologi-ideologi Pendidikan oleh William F. O'neil. Pada buku ini penjelasan mengenai ideologi-ideologi pendidikan secara teori. Filosofi pendidikan dan Ideologi dijelaskan secara eksplisit pada buku ini. Diantaranya Ideologi Konservatif dan Ideologi Liberal dijelaskan secara satu persatu dan jelas. Pada buku ini William F. O'neil menekankan kepada pembahasan filosofis tentang ideology pendidikan. *Kedelapan*, Neoliberalisasi dan Restorasi Kelas Kapitalis oleh David Harvey. Dalam buku ini terlihat betul seorang David Harvey sangat mengerti sejarah dan neoliberalisme kekinian. Harvey menjelaskan apa itu neoliberal tentu dengan contoh-contoh yang detail sampai ciri-ciri neoliberal dan perkembangannya ia bahas dengan model geografis dimana Negara itu berkembang. Terakhir karya tulis ini membahas ketahanan neoliberalisme di perekonomian global dan bagaimana masa depan kebebasan setelahnya.

Dengan mengacu pada studi tentang pendidikan dan neoliberalisme terdahulu penulis menyatakan bahwa karya penulis ini belum pernah dibahas dan dipakai oleh penulis lain. Sebenarnya terdapat kesamaan idea dengan Prof. H.A.R. Tilaar tentang kebijakan-kebijakan korporatokrasi pendidikan namun dalam karyanya itu Prof. H.A.R. Tilaar tidak menjelaskan secara eksplisit sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan secara eksplisit serta memasukan analitis kritis penulis ke dalam setiap kebijakan yang penulis anggap sebagai kebijakan

komersialisasi pendidikan. Pada penelitian penulis juga penulis masukan dampak dari neoliberalisme.

## F. KERANGKA DASAR TEORI

Ada banyak sekali pakar dunia ilmu menciptakan definisi berupa teori-teori tentang kesemestaan ataupun keakhiratan. Suatu teori tentu akan berguna sekali untuk mempermudah telaah kita terhadap masalah yang akan dipaparkan. Maka tentu dari itu signifikansi teori tidak perlu diragukan lagi gunanya sebagai pisau analisis penulis dalam eksplanasi penelitiannya.

### 1. Ideologi Politik

Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

#### a. Kapitalisme

Pada saat titik puncaknya zaman Renainsance. Yaitu pada saatnya legitimasi gereja diragukan oleh rakyat di mulai dari Galileo Galilie tentang Geosentris dan di akhiri oleh Martin Luther King. Dari mereka rakyat merasionalkan lagi kerajaan Monarki yang di legitimasi gereja adalah wakil tuhan, akan tetapi tingkah laku dari mereka sangat jauh dari sifat ketuhanan itu. Akhir rakyat membentuk aliran yang pada saat itu disebut Monarchomacha (gerakan pembantah raja). Dan pada tahap selanjutnya protes ini tidak hanya dalam protes keagamaan dan menjalar

ke bidang-bidang lainnya seperti bidang ilmu pengetahuan yang pada tahap selanjutnya terciptalah teknologi-teknologi canggih yang merupakan cikal bakal Zaman selanjutnya yaitu dari zaman merkantilisme yang masih bersistem kerajaan menuju zaman yang disebut revolusi industri.

Pengaruh para ekonom pada zaman ini adalah berdasarkan "kebebasan" hak-hak individu. Ada beberapa ekonom yang mungkin pada saat itu adalah perintis ekonomi kebebasan (*liberal classic*). Ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar liberalism, sebelas tahun sebelum Adam Smith menulis hal yang sama namun lebih komprehensif dalam *The Wealth of Nations*. Menurut Chydenius, *democracy*, kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.

Revolusi Industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. pada zaman ini perkembangan teknologi

temuan-temuan terbaru yang pada tahap selanjutnya menciptakan korporasi di bidang masing-masing.

*Industrial capitalism* (Pertengahan abad 18<sup>th</sup>) Memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas di bawah fase perdagangan dan investasi pada mesin-mesin produksi. menandai perkembangan dari *the factory system of manufacturing*, dengan ciri utama *complex division of labor* dan *routinization of work tasks*; dan akhirnya memantapkan dominasi global dari *capitalist mode of production*.

Hasil dari proses tersebut adalah Industrial Revolution, dimana industrialisasi menggantikan posisi penting dari *merchant* dalam sistem kapitalis. Pertengahan hingga akhir abad sembilan belas Britain dianggap sebagai contoh klasik dari *laissez-faire* Kapitalisme.

Sejalan dengan ajaran ekonomi politik klasik, dipimpin oleh Adam Smith dan David Ricardo, Britain memunculkan liberalisme, mendorong kompetisi dan perkembangan ekonomi pasar.

Pada masa ini Adam smith lewat bukunya *The Wealth of Nation* yang membuat perubahan dari sebelumnya adalah zaman Merkantilisme menjadi Liberalisme (baca : liberal klasik) lewat teori-teori ekonomi tentang *Laissez-Faire* yang beranggapan bahwa tugas negara hanyalah penjaga malam.

Sebenarnya setelah berabad-abad berlalu tentu paham ekonomi kapitalisme mengalami jatuh bangun hingga paham ini berubah seiring dengan berjalannya waktu namun terdapat beberapa esensi dasar yaitu Ada

tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagai sistem atau tatanan ekonomi, yaitu: (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas- sempurna di pasar; (2) diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi; dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas. Esensi-esensi mendasar dari kapitalisme adalah: *Pertama*, Modal adalah bagian dari kekayaan suatu bangsa yang merupakan hasil karya manusia dan karenanya bisa diproduksi berulang kali (*reproducible*). *Kedua*, Dibawah system kapitalisme, suatu perlengkapan modal masyarakat, alat-alat produksinya, dimiliki oleh segelintir individu yang memiliki hak legal untuk mempergunakan hak miliknya guna meraup keuntungan pribadi. *Ketiga*, Kapitalisme bergantung pada system pasar, yang menentukan distribusi, mengalokasi sumberdaya-sumberdaya dan menetapkan tingkat-tingkat pendapatan, gaji, biaya sewa, dan keuntungan dari kelas-kelas social berbeda.<sup>12</sup>

#### b. Neoliberalisme

Sesuai dengan namanya, neoliberalisme adalah bentuk terbaru atau penyempurnaan dari paham ekonomi pasar liberal sebagai salah satu varian dalam naungan kapitalisme, yaitu yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neokeynesianisme, neomerkantilisme,

---

<sup>12</sup> Lekachman, Robert dan Van Loon, Borin. *Kapitalisme: teori dan sejarah perkembangannya*. Yogyakarta: Resist Book, 2008, hal. 3

neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme klasik.

Menurut teori, negara neoliberal lebih mementingkan hak-hak milik individu, aturan hukum dan pranata-pranata pasar bebas serta perdagangan bebas. Hal-hal tersebut dianggap sebagai syarat mendasar bagi terciptanya kebebasan individu.

Sebagaimana diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali.

Akan tetapi, setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar pada 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadikan sumber malapetaka bagi perkembangan manusia.

Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, maka pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori Rustow dan Eucken, mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rustow dan Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke, Simon, dan Friedman.

Sebagaimana dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas- sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang.<sup>13</sup>

Akan tetapi, dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS), pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep ekonomi Negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.

Sebagaimana diketahui, dalam ekonomi Negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan Negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menjamin stabilitas moneter, menggerakkan sector riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, kedigdayaan keynesianisme tidak tertahan lama. Pada awal 1980-an, menyusul terpilihnya Reagan sebagai Presiden AS, dan Thatcher

---

<sup>13</sup> Baswir, Revrisond. *Bahaya neoliberalisme*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2009, hal 2-3

sebagai perdana menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Di AS hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara massal.

Selanjutnya, terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika Latin, Departemen keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.

Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar dalam SAP (*Structural Adjustment Program*)<sup>14</sup> IMF tersebut adalah:

- 1) Liberalisasi perdagangan. Tujuannya, menghilangkan aturan-aturan yang bersifat melindungi industri domestik dan pasar domestik. Tujuan lainnya, penghapusan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan swasta, seperti biaya sosial akibat kerusakan yang ditimbulkannya. Beban itu sepenuhnya menjadi beban negara.
- 2) Liberalisasi investasi. Karena negara-negara berkembang mengalami kesenjangan dalam hal tabungan dan investasi (*saving investment gap*), dibutuhkan investasi dari luar untuk mendorong

<sup>14</sup> Coen Husain Pontoh. *Akhir Globalisasi*. C-Books. Jakarta : 2003. Hal. 99

pertumbuhan ekonominya, tetapi investor bersedia menanamkan modalnya jika seluruh aturan yang menghambat di berangus, sekaligus para investor diberi rangsangan berupa fasilitas dan kemudahan kemudahan berinvestasi, contohnya, mengizinkan MNC's menguasai saham hingga 100%, pembebasan dari tarif bea masuk, tingkat suku bunga dan tingkat pajak yang sangat rendah.

3) Liberalisasi finansial. Adalah proses dimana alokasi sumberdaya sumberdaya keuangan ditentukan oleh kekuatan pasar ketimbang oleh negara. Minimalisasi kewenangan negara dalam sektor finansial dilakukan dengan mendorong kekuatan pasar untuk menentukan siapa yang memberi dan menerima kredit dan harga. Menurut Kavalijt Singh, komponen komponen kunci liberalisasi finansial adalah : deregulasi tingkat bunga, menolak kontrol kredit, swastanisasi bank pemerintah dan lembaga lembaga keuangan, liberalisasi hambatan masuk sektor atau bank bank dan lembaga lembaga finansial asing kedalam pasar keuangan domestik. Memperkenalkan pasar yang didasarkan pada kontrol moneter sebagai instrumentnya, liberalisasi capital account.

4) Privatisasi (swastanisasi) dalam bentuk penjualan perusahaan perusahaan negara, barang barang dan pelayanan publik kepada pihak swasta. Termasuk disini bank bank negara, industri industri yang melayani kebutuhan vital rakyat banyak, jalan raya, jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan pengelolaan air bersih, semuanya dibungkus dalam janji agung efisiensi.

- 5) Pemotongan anggaran publik untuk pelayanan sosial. Menurut strategi neoliberal, seluruh kebijakan negara hanya ditujukan untuk melayani kepentingan perusahaan perusahaan swasta, bukan melayani kepentingan publik yang tidak produktif. Karena itu, anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun, dan sebagainya harus dihapuskan, karena sektor sektor tersebut tidak dikategorikan sektor produktif. Bahkan adanya anggaran untuk kepentingan publik menandakan negara telah campur tangan dalam mekanisme pasar.
- 6) Pemotongan subsidi subsidi negara, subsidi terutama untuk kebutuhan kebutuhan pokok rakyat. Merupakan salah satu instrument untuk retribusi keadilan. Para ekonom percaya, pasar sempurna itu tak pernah ada sehingga butuh intervensi negara untuk mendistribusikan kemakmuran. Tetapi karena melalui subsidi negara telah mencampuri mekanisme pasar, maka tanpa ampun mekanisme itupun harus dihapus.
- 7) Devaluasi Nilai Mata Uang
- 8) Upah buru yang super murah melalui penghancuran serikat buruh dan pembatasan hak hak buruh yang telah dimenangkannya dalam perjuangan selama bertahun tahun.
- 9) Deregulasi. Menurut Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garscia, semangat deregulasi dalam neoliberalisasi adalah menghapuskan peraturan peraturan negara yang dapat mengurangi tingkat pengerukan negara yang dapat mengurangi tingkat pengerukan kaum kapitalis. Misalnya, peraturan

tentang lingkungan hidup, kesejahteraan buruh, keselamatan ditempat kerja, dsb.

### c. Globalisasi

Globalisasi berarti proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah Negara mempengaruhi Negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana peristiwa politik, ekonomi, budaya, dan social semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu berkaitan dengan kehidupan social, ekonomi, dan politik.<sup>15</sup>

Globalisasi menurut institusi pilarnya, yakni Bank Dunia (*World Bank*) adalah proses sharing kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda semua masyarakat di berbagai Negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan aliran pasar modal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Baylis, John dan Smith, Steve dalam Amien Rais, Mohammad. *Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK, 2008, hal. 12

<sup>16</sup> [http://www1.worldbank.org/economic\\_policy/globalization/ag\\_01.htm](http://www1.worldbank.org/economic_policy/globalization/ag_01.htm), The World Bank Group, Globalization

Globalisasi menurut IMF (*International Monetary Fund*) Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama lewat arus perdagangan dan keuangan.<sup>17</sup>

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi:

- 1) *Internasionalisasi*: Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.

---

<sup>17</sup> <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm>, globalization: Threat or Opportunity?

- 2) *Liberalisasi*: Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
- 3) *Universalisasi*: Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
- 4) *Westernisasi*: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.
- 5) *Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas*: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.<sup>18</sup>

d. Ideologi State Aparatus (ISA) dan Represif State Aparatus (RSA)

Pendekatan Represif State Aparatus (RSA) dan Ideologi State Aparatus (ISA) adalah sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Louis Althusser (1918-1990). Membahas RSA dan ISA tentunya tidak terlepas dengan konsep negara yang diteorikan Marx bahwa negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, yakni kelas bangsawan dinegara feodal dan pemilik

---

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

modal di negara kapitalis. Negara dipandang sebagai aparatur represif yang memungkinkan kelas-kelas penguasa untuk mendominasi kelas buruh.

Represif State Aparatus terdiri dari pemerintah, birokrasi, tentara, polisi, peradilan, penjara dan sebagainya. Represif disini menyatakan bahwa aparatus negara menjalankan fungsinya dengan kekerasan (karena ada represi, sebagai missal represi administratif yang merupakan contoh lain represif non-fisik).

Sedangkan Ideologi State Aparatus (ISA) dimana realitas-realitas itu akan terlihat dengan begitu gamblang bagi pengamat langsung dalam bentuk-bentuk institusi-intituti yang berbeda dan terspesialisasi. Daftar empiris dari institusi ini antara lain adalah institusi keagamaan, institusi pendidikan (sistem persekolahan negeri dan swasta yang bermacam-macam), keluarga, institusi hukum, institusi politik (sistem politik, termasuk partai-partai politik yang beraneka ragam), serikat buruh, institusi komunikasi (pers, televise, dan lain sebagainya) dan institusi kebudayaan.<sup>19</sup>

Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua pendekatan ini adalah Represif State Aparatus menjalankan fungsinya dengan kekerasan sementara Ideologi State Aparatus menjalankan fungsinya dengan ideologi.

---

<sup>19</sup> Althusser, Louis. *Filsafat sebagai senjata revolusi*. Yogyakarta : Resist Book, 2007, hal. 165-166

Peran aparatus represif Negara, sepanjang dia menjalankan perannya sebagai aparatus yang represif, pada esensinya terdiri dari pelanggaran secara paksa (baik bersifat fisik maupun tidak) kondisi-kondisi politik yang diperlukan bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan relasi eksploitasi. Bukan hanya aparatus Negara itu turut terlibat dengan senang hati dalam reproduksi dirinya sendiri (karena Negara kapitalis terdiri atas atau menguasai dinasti-dinasti politik, dinasti-dinasti militer, dan sebagainya), namun juga terutama aparatus Negara melanggengkan dengan represi, (dari mulai kekuatan fisik yang paling brutal, via sekedar komando dan larangan administrasi, sampai dengan tindakan penyensoran secara terbuka maupun diam-diam) kondisi-kondisi politik bagi pelaksanaan aksi aparatus ideologis Negara.<sup>20</sup>

Sedangkan peran dari aparatus ideologi Negara, apapun intitusinya menjalankan dan turut berperan atas hasil yang sama yaitu, reproduksi relasi-relasi produksi yang tak lain adalah eksploitasi kelas dominasi. Setiap aparatus tersebut menjalankan perannya masing-masing. Aparatus politik menjalankan perannya dengan cara menduduki individu-individu dalam ideologi politik Negara, aparatus agama menjalankan perannya dengan khutbah-khutbah yang mendukung segala agenda politik, sehingga masyarakat percaya dengan itu, begitu pula dia mempercayai agamanya, aparatus kebudayaan menjalankan peranannya dengan memberikan kelulusan sensor pada produk-produk kapital yang sebenarnya masih tabu

---

<sup>20</sup> Ibid hal 170

dengan kultur budaya local, dan apparatus pendidikan menjalankan peranannya dengan memasukan atau menanamkan pengetahuan praktis yang menjadi pembungkus ideologi yang berkuasa, dalam rangkah mencapai rational bertujuan. Lalu peranan apparatus komunikasi dengan cara memberikan doktrin faham-faham ideologi melalui media komunikasi seperti pers, radio, televisi yang secara langsung mempengaruhi opini-opininya terhadap pandangan dunia sosialnya.

Pandangan diatas telah mengarahkan kita untuk memahammi apa sebenarnya membentuk kesatuan diantara lembaga-lembaga apparatus ideologi Negara yang kelihatannya terpisah-pisah, akan tetapi jika ain-ain berfungsi secara massif dan terutama menggunakan ideologi, apa yang menyatukan keberagaman lembaga-lembaga apparatus ideologi itu adalah pelaksanaan fungsi tersebut karena ideology mereka jalankan adalah sama, yaitu ideologi itu adalah ideologi berkuasa. Atas berdasarkan fakta bahwa kelas berkuasa secara prinsip merupakan pemegang kekuasaan Negara, baik secara terbuka maupun lebih sering dengan membentuk aliansi diantara kelas atau fraksi-fraksi kelas, dan fakta bahwa kelas yang berkuasa itu pula yang aktif dalam Aparatus Ideologi Negara.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi ganda, dengan cara represi dan dengan cara ideologi, entah itu yang dijalankan oleh apparatus represif Negara ataupun apparatus ideologi Negara menurut pandangan Althusser, memperlihatkan dengan jelas bahwa bisa jadi ada kombinasi yang eksplisit

---

<sup>21</sup> Ibid hal 171

atau diam-diam yang sangat halus muncul dari interplay antara apparatus represif dengan apparatus ideologi Negara,<sup>22</sup>

#### e. Hegemoni

Teori hegemoni Antonio Gramsci adalah sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kempemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan Hegemoni , sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.<sup>24</sup>

Namun terdapat perbedaan antara teori hegemoni yang di sampaikan oleh Marx dengan konsep hegemoni Gramsci. Menurut Marx hegemoni itu hanya terbatas pada kekuasaan ideologi (Suprastruktur) atas keunggulan ontologis substruktur ekonomi. Perbedaan mencolok antara keduanya

---

<sup>22</sup> Ibid hal 10

<sup>23</sup> Sugiono, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hal. 31

<sup>24</sup> Ibid hal. 33

adalah dalam pandangan Marxisme Ortodoks perhatian hanya diarahkan pada Suprastruktur yaitu bagaimana penguasaan di lakukan oleh kelas penguasa kepada kelas bawah.

Sedangkan menurut Gramscian penting juga melihat signifikansi ideologi dan kebudayaan sebagai factor hegemoni selain suprastruktur. Gramsci membagi pengertian suprastruktur dalam dua level struktur utama: tingkat pertama ia sebut "Masyarakat Sipil" dan yang lainnya "Masyarakat Politik".<sup>25</sup>

Masyarakat sipil mencakup seluruh apparatus transmisi yang lazim disebut "swasta" seperti universitas, sekolah media massa, gereja dan lain sebagainya. Karena apparatus-apparatus tersebut memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok(-kelompok) berkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuannya mengontrol apparatus-apparatus tadi.

Sedangkan masyarakat politik sebaliknya adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah. Termasuk dalam kategori ini antara lain institusi seperti tentara, politisi, pengadilan, birokrasi dan pemerintah. Dengan kata lain, hal ini menunjuk pada semua institusi yang biasa disebut Negara. Ringkasnya, bagi Gramsci, kedua level suprastruktur ini merepresentasikan kedua rana yang

---

<sup>25</sup> Ibid hal. 34-35

berbeda, yaitu ranah persetujuan dalam masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam masyarakat politik.

Marxisme Ortodoks memusatkan perhatian pada konflik yang ditimbulkannya oleh pembagian setiap masyarakat menjadi dua kelas, perhatian serupa juga mereka curahkan pada signifikansi penggunaan kekuatan dan koersi Negara sebagai representasi dari kelompok (-kelompok) yang berkuasa. Gramsci tidak menyangkal akan pentingnya kekuatan koersif dari Negara akan tetapi itu merupakan jalan terakhir yang digunakan karena kekuasaan hanyalah salah satu dari bermacam-macam bentuk kekuasaan. Lebih jauh hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kelompok berkuasa mengandalkan kekuasaan koersif Negara untuk menjaga kekuasaannya hanya menunjukkan kelemahan ideologis maupun cultural daripada keperkasaannya. Sebuah hubungan hegemonic ditegakkan ketika kelompok berkuasa berhasil mendapatkan persetujuan kelompok subordinat atas subordinasi mereka. Dengan kata lain, kelompok-kelompok subordinat menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok berkuasa seperti layaknya punya mereka sendiri. Dengan demikian legitimasi kekuasaan kelompok berkuasa tidak ditentang karena ideology, cultural, nilai-nilai, norma dan politiknya sudah diinternalisasikan sebagai kepunyaan mereka sendiri oleh kelompok-kelompok subordinat. Begitu consensus ini didapat, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik itu semakin terlihat "wajar dan legitimate" dan ini berarti penggunaan kekuasaan koersif oleh Negara menjadi tidak penting lagi.

Teori hegemoni gramsci menandai perpisahannya lebih lanjut dari tradisi Marxis klasik saat ia lebih banyak memberi penekanan pada consensus daripada kekuatan dan dominasi sebagai batu sendi tatanan social. Gramsci tidak memandang ideology hanya sebatas sebagai abstraksi realitas tanpa makna, akan tetapi meyakini bahwa persemaian ide-ide dan kultur kelompok-kelompok berkuasa memainkan peran sangat penting dalam rangka mencapai hegemoni kelompok itu. Sebagaimana ia tulis dalam *prison Notebooks*:

Ide dan opini tidak "lahir" secara spontan dalam benak tiap individu: keduanya mempunyai pusat formasi, iradiasi, persebaran, persuasi sekelompok orang, atau bahkan individu tunggal, yang mengembangkan dan menghadirkan keduanya dalam bentuk realitas politis mutakhir.

Dalam pandangan Gramsci, ini menjelaskan mengapa suatu kelompok berkuasa harus memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari massa. Lebih lanjut Gramsci mengemukakan, dengan berbuat demikian kelompok berkuasa harus mampu membuat kelompok atau massa lain menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma atau nilainya menjadi milik mereka juga. Sekali "pandangan dunia" kelompok yang berkuasa sudah diterima dan diinternalisasikan oleh massa atau kelompok lain, maka kelompok berkuasa itu berhasil memantapkan hegemoninya dan, dengan sendirinya, legitimasinya untuk memerintah terjamin sudah.

Pendek kata, hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan.

Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, cultural, dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Ini berarti kelompok penguasa harus “menguniversalkan” pandangan dan kepentingannya serta harus memastikan bahwa pandangan dan kepentingan itu tidak hanya bisa tetapi juga harus menjadi pandangan dan kepentingan kelompok-kelompok subordinat<sup>26</sup>.

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaanya, dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakikat dan ciri-ciri kemanusiaanya. Dan pendidikan formal di sekolah hanyalah bagian kecil saja daripadanya, tetapi merupakan inti dan tidak bisa lepas kaitannya dengan proses pendidikan secara keseluruhannya.<sup>27</sup>

Dengan pengertian pendidikan yang luas, berarti bahwa masalah kependidikan pun mempunyai ruang lingkup yang luas pula, yang menyangkut seluruh aspek hidup dan kemanusiaan manusia. Memang diantara permasalahan kependidikan tersebut terdapat masalah yang sederhana yang menyangkut praktek dan pelaksanaan sehari-hari, tetapi

---

<sup>26</sup> Ibid hal. 41-42

<sup>27</sup> Prasetya. *filsafat Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2002, hal. 13

banyak pula yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam memecahkannya. Bahkan pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin dijawab dengan menggunakan analisa dan pemikiran yang mendalam, yaitu analisa filsafat.

#### a. Pengertian Filsafat Pendidikan

Asumsi dasar lahirnya filsafat pendidikan adalah pertama bahwa asumsi ilmu pendidikan adalah ilmu normatif, yang berarti berarti bahwa ilmu pendidikan merupakan disiplin ilmu yang berarti bahwa ilmu pendidikan merupakan disiplin ilmu yang merumuskan kaidah-kaidah norma, atau nilai yang akan dijadikan ukuran tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan manusia, yaitu mahluk yang bernama manusia yang hidup di masyarakat manusia. Sesuai asumsi di atas, maka ilmu pendidikan erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan normative, seperti agama, filsafat, dan kebudayaan serta ilmu sosiologi, sebagai disiplin ilmu yang merupakan sumber norma dan nilai hidup dan pendidikan. Dengan demikian *way of life* sosial masyarakat sebuah Negara ditentukan oleh budaya pendidikan di Negara tersebut.

Asumsi dasar kedua bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan praktis, artinya bahwa tugas budaya dari pendidikan sebagai aspek kebudayaan adalah menyalurkan dan melestarikan nilai-nilai ke generasi selanjutnya untuk dikembangkan selanjutnya.

Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung dalam bahasannya tentang filsafat pendidikan diberi definisi sebagai berikut:

- 1) Filsafat pendidikan adalah penerapan metoda dan pandangan filsafat dalam pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Filsafat pendidikan adalah mencari konsep-konsep yang menyelaraskan gejala yang berbeda-beda dalam pendidikan dan suatu rencana menyeluruh, menjelaskan istilah-istilah pendidikan, mengajukan prinsip-prinsip atau asumsi-asumsi dasar tempat tegaknya pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai pendidikan dan menyingkap klasifikasi-klasifikasi yang menghubungkan antara pendidikan dan bidang-bidang kepribadian manusia.
- 2) Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan dan menerapkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Jadi disini filsafat, filsafat pendidikan, dan pengalaman manusia adalah tiga elemen bagi suatu kesatuan yang utuh.
- 3) Filsafat pendidikan adalah aktivitas yang dikerjakan oleh pendidik dan filosof-filosof untuk menjelaskan proses pendidikan, menyelaraskan, mengkritik dan merubahnya berdasar pada masalah-masalah kontradiksi-kontradiksi budaya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid hal. 22

Filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi megarahkan pusat perhatiannya dan memusatkan kegiatannya pada dua fungsi tugas *normative ilmiah*. *Pertama*, kegiatan merumuskan dasar-dasar, dan tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang sifat hakekat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya. *Kedua*, merumuskan system atau teori pendidikan (*science of education*) yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan atau organisasi pendidikan, metodologi pendidikan dan pengajaran, termasuk pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan Negara.

b. Pendekatan-pendekatan Filsafat Pendidikan

- 1) *Antara teori dan praktek*. Pada dasarnya teori dan praktek adalah hubungan saling mengontrol, teori akan di kontrol oleh pelaksanaan praktek yang baik, dan sebaliknya praktek dikontrol oleh atau didasarkan pada landasan teoritis yang baik.
- 2) *Pendekatan problematik terhadap kenyataan sosiologis*. Berdasarkan atas kesulitan-kesulitan dan problema yang dihadapi masyarakatnya ia mencoba merumuskan ke dalam suatu system pemikiran filosofis, yaitu filsafat pendidikan yang problematic atau eksperimentalisme.

c. Demokrasi Pendidikan

- 1) Demokrasi pendidikan ini pada dasarnya adalah berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, berbunyi:
  - a) Tiap-tiap Negara berhak mendapatkan pengajaran.

b) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

2) Demokrasi pendidikan berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, pasal 6, dan pasal 7.

a) Pada pasal 5 : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

b) Pada pasal 6 : Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

c) Pada pasal 7 : Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Sedangkan menurut pandangan islam demokrasi pendidikan bisa kita simak dalam hadist Nabi Muhammad SAW. yang mengatakan bahwa:

*“menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim (baik pria maupun wanita)”*

Jadi setiap warga Negara yang berdomisili dan berstatus warga Negara Indonesia harus mendapat hak pendidikan secara merata itulah arti menurut penulis dari demokrasi pendidikan. Berikut merupakan

Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah antara lain: *Pertama*, Hak asasi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan. *Kedua*, Kesempatan yang sama bagi warga Negara untuk memperoleh pendidikan. *Ketiga*, Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.

#### G. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat tentang fenomena yang diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

Definisi konseptual yang digunakan oleh penyusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapitalisme adalah paham yang mementingkan hak-hak milik individu dan menggunakan mekanisme pasar yang bebas sehingga meminimalnya peran negara.
2. Neoliberalisme adalah bentuk terbaru atau penyempurnaan dari paham ekonomi pasar liberal perbedaannya dalam merevolusi tangan-tangan produksinya paham ini menjadikan negara sebagai alat penjamin hukum legalnya suatu kegiatan modal untuk tujuan produksi.
3. Globalisasi adalah dunia dimana peristiwa politik, ekonomi, budaya, dan sosial antar bangsa semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar.

4. *Ideologi State Aparatus* (ISA) adalah ideologi yang dijalankan atau diinternalisasikan oleh penguasa yang berkuasa untuk tujuan tertentu dan *Represif State Aparatus* (RSA) adalah kebijakan hukum, norma, dan berbagai peraturan yang mengikat atau memaksa yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu.
5. Hegemoni adalah situasi ketika pandangan kaum subordinat dikuasai secara sadar dan tidak sadar secara sukarela oleh kaum penguasa.

1. Pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan dan menerapkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.
2. Demokrasi Pendidikan adalah setiap warga negara yang berdomisili dan berstatus warga negara Indonesia harus mendapat hak pendidikan secara merata.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yang dimaksud dengan penelitian model ini diselidiki dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian, berdasarkan realitas yang ada tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan yang dimaksud eksploratif adalah penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan.

## 2. Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan yaitu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

## 3. Data dan Sumber Data

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi pustaka melalui buku-buku atau literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang sering disebut dengan sumber sekunder. Adapun bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-buku, media massa, Undang-Undang, laporan penelitian, jurnal, internet, dan makalah.

## 4. Unit Analisis

Unit analisa pada penelitian ini memfokuskan pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu, teknik pengumpuln melalui dokumen-dokumen yang tersedia menjadi objek diantaranya dokumen unit analisa pada penelitian ini memfokuskan pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berdasarkan atas filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>29</sup> Analisa pada penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk angka-angka atau statistik, namun merupakan bentuk sajian data berupa analisa dari masing-masing variabel, mula-mula data yang diperoleh dari membaca, mempelajari, menelaah dan selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data sesuai dengan bidang isu yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>29</sup> Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010, hal. 14